

PERSEPSI DAN INTENSI PELAKU UMKM TERHADAP PENGUNAAN QRIS SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI KOTA TASIKMALAYA

Alis Santika¹, Ranti Aliyani^{2*}, Ria Mintarsih³

^{1,2,3} Universitas Siliwangi, Jalan Siliwangi No. 24 Kahuripan Kota Tasikmalaya, Indonesia

E-mail: ¹⁾ 192165024@student.unsil.ac.id, ²⁾ 192165018@student.unsil.ac.id,

³⁾ 192165064@student.unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan intensi UMKM terhadap penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran berbasis digital di Kota Tasikmalaya. Pendekatan penelitian kualitatif melalui desain fenomenologi digunakan untuk menguraikan fenomena tersebut. Teknik yang digunakan berupa triangulasi data yakni dengan menggabungkan sumber data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel penelitian sebanyak 10 UMKM di Kota Tasikmalaya yang telah menggunakan QRIS sebagai proses pembayaran secara digital. Indikator yang digunakan untuk melihat persepsi pada pelaku UMKM ditinjau dari persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko. Adapun intensi pelaku UMKM terhadap QRIS juga dibentuk dari ketiga persepsi tersebut disertai kendala atau pun hambatan dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap QRIS sehingga bisa membentuk intensi yang kuat bagi mereka untuk menerapkan sistem pembayaran secara digital melalui QRIS.

Kata Kunci: QRIS, Persepsi, Intensi, UMKM, Sistem Pembayaran Digital

Abstract

This research aims to determine the perceptions and intentions of SMEs towards the use of QRIS as a digital-based payment system in the City of Tasikmalaya. qualitative research approach through phenomenological design. The technique used is data triangulation, in the form of combining data sources obtained from observations, interviews, and documentation. The research sample consists of 10 SMEs in Tasikmalaya City that have used QRIS as a digital payment process. The indicators are used to see the perception of SMEs in terms of perceptions of benefits, perceptions of convenience, and perceptions of risk. The intentions of SMEs actors towards QRIS are also formed from the three perceptions accompanied by obstacles or obstacles and external factors that influence them. This study indicates that SMEs actors have a positive perception of QRIS so that they can form strong intentions for them to implement a digital payment system through QRIS.

Keywords: QRIS, Perception, Intention, SMEs, Digital Payment System

1. PENDAHULUAN

Sebuah infeksi virus bernama *coronavirus disease* atau biasa dikenal dengan COVID-19 muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar secara cepat. Awalnya, virus ini ditemukan di Kota Wuhan, China yang kemudian menyebar secara massif ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau *World*

Health Organization mengumumkan bahwa COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi (Sugianti & Anwar, 2021).

Wabah COVID-19 ini menimbulkan efek pergeseran interaksi antar manusia, di antaranya mengurangi intensitas pertemuan fisik, tatap muka termasuk dalam meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi. Penggunaan *digital payment* bisa mendukung pola transaksi tersebut. Di era digital ini, perkembangan teknologi dan informasi yang maju akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi digital serta dalam proses percepatan inklusi keuangan digital suatu negara, termasuk Indonesia.

Adapun salah satu bentuk implementasi antar teknologi informasi dengan pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi secara *non – tunai*. Dalam sistem pembayaran *non – tunai*, pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada upaya penurunan risiko dan peningkatan efisiensi pembayaran (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020). Di era ekonomi digital, bank sentral Indonesia juga terus berusaha memperkuat peran dan fungsinya sebagai regulator di bidang sistem pembayaran termasuk sistem pembayaran *non – tunai* berikut melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan risiko yang ada.

Dalam mendukung pola transaksi di masa pandemi COVID-19 sampai sekarang, BI mendorong transaksi *non – tunai* terutama yang bersifat *contactless* yang lebih Cermat, Mudah, Murah, Aman, Handal) untuk melakukan transaksi dibandingkan dengan alat atau sistem pembayaran yang menggunakan uang atau kartu, mengingat tidak ada kontak fisik antara penjual dengan pembeli (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Selain itu, BI juga berupaya dalam membantu persiapan “*new normal*” di mana pola transaksi pembayaran ke depan yang akan mengurangi adanya kontak fisik (*contactless*).

Demi mendukung pola transaksi *non – tunai* dan *contactless* di era ekonomi digital, Bank Indonesia merilis sistem pembayaran *online* dengan julukan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS). QRIS merupakan sebuah terobosan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah serta bisa diawasi regulator dari satu pintu (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020). QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) adalah QR Code yang digunakan dalam bertransaksi lewat implementasi uang yang berbasis *elektronik server based*, dompet digital (*e-wallet*), dan *mobile banking*, yang mulai aktif di 1 Januari 2020 (Silalahi et al., 2022). Dengan transaksi pembayaran digital ini akan banyak manfaat yang diperoleh baik itu bagi pengusaha atau pedagang maupun masyarakat umum itu sendiri.

Di era perkembangan digitalisasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dalam perekonomian Indonesia diharuskan untuk melek teknologi supaya perkembangan usaha mereka tidak ketinggalan dengan produk-produk usaha lainnya. Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, penggunaan QRIS mencapai 190.706 naik 47% sejak 22 Maret 2022, *merchant* sedang mencapai 333.992 alias naik 26%, usaha kecil menengah (UKM) mencapai 685.328 naik menjadi 125%, usaha mikro kecil menengah (UMKM) mencapai 2.603.516 naik menjadi 9%, dan *merchant* donasi mencapai 9.288 naik menjadi 132% (Silalahi et al., 2022).

Adapun di tahun 2022, Bank Indonesia (BI) menargetkan sebanyak 15 juta *merchant* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai menggunakan *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS). Hal tersebut dilakukan oleh BI dalam mendorong perluasan digitalisasi UMKM sebagai bagian dalam upaya memberdayakan UMKM dan menarik lebih

banyak UMKM untuk turut serta dalam kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan proses kurasi yang lebih baik dan terdigitalisasi (Pracoyo et al., 2022). BI juga menyebutkan, bahwa melalui QRIS proses digitalisasi UMKM akan lebih dipercepat sehingga dapat mendukung inklusi ekonomi dan keuangan nasional, termasuk ketersediaan data UMKM yang selama ini masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UMKM (Sihaloho et al., 2020).

Implementasi uang digital yang digunakan untuk pembayaran secara *online* ataupun *offline* dapat memudahkan para pengusaha atau pedagang untuk bertransaksi, khususnya bagi para pelaku UMKM. Peningkatan dalam penggunaan *e-wallet* di masa pandemi Covid-19 juga berhubungan dengan persepsi dan intensi UMKM dalam menerapkan QRIS. Indonesia sendiri memiliki banyak *E-Wallet*, menurut data dari Iprice tahun 2019 yang dihimpun oleh Devita (2019) menunjukkan bahwa ada 10 *e-wallet* yang paling populer antara lain Gopay, OVO, DANA, Link Aja, Jenius, Go Mobile by CIMB, ISaku, Sakuku, Doku, dan Paytren (Indriyani & Sartika, 2022).

Mayoritas generasi Z di Kota Tasikmalaya juga telah mengetahui dan mengaplikasikan sistem pembayaran melalui *e-wallet* pada kegiatan sehari-hari khususnya selama masa pandemi COVID-19 (Indriyani & Sartika, 2022). Dengan begitu, akan ada kerjasama antara para UMKM dengan pihak penyelenggara *e-wallet* yang nantinya mampu meningkatkan keuangan inklusif serta memajukan perekonomian Indonesia.

Akibat perkembangan dalam bidang digitalisasi UMKM melalui QRIS, banyak UMKM di Kota Tasikmalaya yang sudah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran *non – tunai*. Namun belum diketahui faktor-faktor yang menyebabkan para UMKM bertransformasi atau menambah sistem pembayaran berbasis digital melalui QRIS, sehingga perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi intensi UMKM di Kota Tasikmalaya menggunakan QRIS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan intensi UMKM terhadap penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai system pembayaran berbasis digital di Kota Tasikmalaya.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Persepsi dan Intensi

Menurut Asrori (2007), persepsi merupakan proses individu dalam menginterpretasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu itu berada serta merupakan hasil dari bentuk pengalaman dan proses belajar.

Sementara Intensi menurut Fishbein dan Ajzen (1975) adalah komponen dari dalam diri individu yang lebih mengacu pada keinginan atau kehendak seorang individu untuk melakukan tingkah laku tertentu (Kurniasih et al., 2013). Tarmudji (2006) juga menyatakan bahwa intensi atau minat adalah perasaan tertarik atau berkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada orang lain yang meminta atau menyuruh (Kurniasih et al., 2013).

2.2. Persepsi Manfaat

Davis et al. (dalam (Ningsih et al., 2021)) menjelaskan arti persepsi kemanfaatan sebagai tingkatan dimana pengguna (*user*) yakin bahwa dengan menggunakan teknologi/system mampu meningkatkan performa atau kinerjanya.

2.3. Persepsi Kemudahan Penggunaan

Fusiler dan Durlabhji berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan diantaranya bisa merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi yang berguna melaksanakan kegiatan yang diinginkan, bisa berinteraksi dengan layanan teknologi *mobile commerce* serta tidak memerlukan usaha yang besar (Ningsih et al., 2021).

2.4. Persepsi Risiko

Featherman & Pavlou (2003) menyatakan bahwa persepsi risiko adalah suatu persepsi tentang ketidakpastian dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari menggunakan suatu produk atau layanan (Silalahi et al., 2022). Persepsi risiko ini bisa sangat mempengaruhi pada tingkat kepercayaan individu. Semakin besar persepsi risiko dari suatu individu maka semakin kecil tingkat kepercayaannya, begitu pula sebaliknya.

2.5. Quick Response [QR] Code Indonesian Standard (QRIS)

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar nasional QR Code pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020). QR Code itu sendiri merupakan serangkaian kode yang memuat data atau informasi berupa identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran (Kristanti & Marta, 2021).

Pembayaran digital dengan menggunakan QRIS dilakukan melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik atau digital serta *mobile banking*. Sistem QR Code pada QRIS menggunakan *Merchant Presented Mode* (MPM) dan didukung spesifikasi interkoneksi antar penyelenggara. Jadi, ketika melakukan transaksi pengguna (*user*) hanya cukup scan QR yang telah tersedia di *merchant-merchant* (pelaku usaha) yang sudah bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan kasir cukup memantau status transaksi dari aplikasi. Pembayaran menggunakan QRIS ini dapat dilakukan tanpa kotak fisik sama sekali. Beberapa contoh aplikasi di Indonesia yang terhubung diantaranya LinkAja, OVO, Gopay, DANA, Yap!, TBank, Mandiri *e-cash* serta diberbagai *mobile banking* lainnya (Paramitha & Kusumaningtyas, 2020).

Standar kode QR Nasional melalui QRIS memberikan banyak manfaat, antara lain (Hutagalung et al., 2021):

- a. Bagi Pengguna aplikasi pembayaran:
 - 1) Lebih cepat dan kekinian.
 - 2) Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.
 - 3) Aman dan terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia secara pasti.
 - 4) Pengeluaran tercatat.
- b. Bagi Merchant:
 - 1) Transaksi tercatat dan langsung masuk rekening sehingga dapat dengan mudah dimonitor dan diawasi perusahaan.
 - 2) Mampu meningkatkan *branding*.
 - 3) Lebih praktis karena hanya cukup menggunakan 1 (satu) QRIS.
 - 4) Murah dan bebas biaya bagi Usaha Mikro

- 5) Tidak memerlukan uang kembalian, bebas risiko pencurian dan terhindari dari uang palsu.
- 6) Membangun *credit profile* untuk kemudahan dalam mendapatkan pinjaman ke depan.
- 7) Mengikuti tren sehingga berpotensi meningkatkan penjualan.

2.6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Suci, 2017).

2.7. Kriteria UMKM

Dalam pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 dijelaskan mengenai kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
- b. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.
- c. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (Suci, 2017).

2.8. Sistem Pembayaran Digital

Menurut Mulyadi sistem diartikan sebagai sekelompok unsur atau bagian yang saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Musthofa et al., 2020). Pembayaran dapat didefinisikan sebagai suatu pemindahan sejumlah uang dari pembayar ke penerima. Sistem

pembayaran menurut Bank Indonesia yaitu suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan suatu mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan uang untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari suatu kegiatan ekonomi (Rayadi & Maradesa, 2021). Pembayaran digital yaitu suatu kegiatan pembayaran yang berbasis teknologi. Dalam pembayaran digital tersebut uang akan disimpan, kemudian diproses, serta diterima dengan bentuk informasi digital dan juga elektronik. Pembayaran digital ini dilakukan dengan menggunakan suatu software tertentu, kartu pembayaran tertentu, serta uang elektronik. Sistem pembayaran secara digital ini menyediakan suatu cara pembayaran untuk pembelian terhadap barang ataupun jasa yang melalui internet (Tarantang et al., 2019).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologi. Menurut Creswell (1998), pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai dengan ditemukan dasar tertentu. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau pun fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada setiap individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji (Abdussamad, 2021).

Populasi yang digunakan adalah UMKM yang berada di Kota Tasikmalaya. Adapun sampel penelitian sebanyak 10 UMKM di Kota Tasikmalaya yang telah menggunakan QRIS sebagai proses pembayaran secara digital. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya melalui observasi, wawancara. Wawancara dilaksanakan setelah observasi dilakukan agar data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi tentang subjek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah diketahui bahwa Bank Indonesia sudah meluncurkan sebuah sistem pembayaran untuk menstandarisasi seluruh pembayaran secara *non-tunai* berbasis *server* dengan menggunakan media QR Code sebagai transaksi digital. Secara nasional, implementasi QRIS mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2020 di Indonesia dan penerapan dari QRIS ini lebih diutamakan terlebih dahulu kepada para pedagang UMKM (Sihaloho et al., 2020).

Pada penelitian yang telah dilakukan, 10 UMKM yang menjadi narasumber telah mampu mengimplementasikan QRIS dalam proses transaksinya. Mereka juga sudah mengetahui dan memahami makna dan tujuan dari QRIS. Para pelaku UMKM tersebut mengatakan bahwa QRIS merupakan suatu kode QR yang dilakukan untuk pembayara secara *non-tunai* dan bertujuan agar pembayaran bisa dilakukan secara *online*, lebih efektif dan efisien dalam kegiatan transaksi, lebih cepat dan terjaga kemanannya serta lebih praktis.

Berikut ini beberapa tanggapan para pelaku UMKM ditinjau dari persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan persepsi risiko.

4.1. Persepsi Manfaat

Dari 10 UMKM yang telah kami wawancarai, mereka sangat merasakan manfaat terhadap adanya QRIS ini bagi usahanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 001, *“manfaat yang saya rasakan dengan adanya QRIS yaitu lebih praktis, cepat, simple, lebih higienis, juga terhidar dari uang palsu, serta transaksi keuangan yang masuk melalui QRIS akan tercatat secara otomatis”*. Adapun pernyataan yang disampaikan 003, *“pendapatan lebih maksimal karena lebih mencakup semua kalangan terutama orang-orang yang jarang membawa uang tunai”*. Kemudian, terdapat pernyataan yang dikemukakan oleh 005, *“tidak perlu repot untuk menyediakan uang receh untuk kembalian karena pembayarannya pas sesuai harga melalui QRIS”*. Pernyataan yang senada juga dikemukakan oleh 002, *“tidak perlu ada kata kembalian dengan permen”*. Selain itu, hal lain dinyatakan oleh 007 *“Dengan adanya QRIS ini sebagai suatu penerapan dalam system pembayaran untuk mengikuti perkembangan zaman serta teknologi”*. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa QRIS sangat memberikan manfaat diantaranya sangat menguntungkan, memberi alternatif pembayaran serta mengurangi kontak fisik (Setiawan & Mahyuni, 2020).

4.2. Persepsi Kemudahan

Ditinjau dari persepsi kemudahan dalam menggunakan QRIS, semua pelaku UMKM yang telah diwawancarai mengatakan bahwa mudah dalam menggunakan QRIS ini. Dimana hal tersebut tercermin dari pernyataan 005, *“Mudah, cukup scan kode QR yang tersedia menggunakan Handphone pembeli/konsumen”, “sangat mudah tidak ribet”, “mudah, karena saya cukup menyediakan kode QR dalam pembayarannya”*. Kemudian, di pertegas oleh 001, *“ya, karena mudah dimengerti ketika digunakan terus lebih efisien dan fleksibel saja selagi ada jaringan internet yang baik”*. Dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pelaku UMKM, mereka beranggapan bahwa dengan adanya QRIS ini mampu memudahkan dalam proses pembayaran serta praktis. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa QRIS sangat memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli (Hutagalung et al., 2021).

4.3. Persepsi Risiko

Sebagian pelaku UMKM yang telah kami wawancarai beranggapan bahwa kendala ataupun hambatan penggunaan QRIS itu kecil dan tidak terlalu signifikan. Hal tersebut seperti yang di kemukakan oleh 009, *“paling kendalanya sih error, loading”, “mungkin kendalanya yaitu apabila kita tidak mempunyai kouta akan sulit menggunakan QRIS”*. Kemudian, pernyataan lain dari 004, *“paling hambatannya sedikit di lamanya waktu proses dana yang masuk ke rekening karena membutuhkan waktu 1x24 jam serta adanya biaya penggunaan QRIS”*. Namun, sebagian UMKM beranggapan bahwa tidak merasakan kendala ataupun hambatan yang berarti pada saat menerapkan QRIS ini.

Ditinjau dari risiko dalam menggunakan QRIS, mayoritas pelaku UMKM yang telah kami wawancarai menyatakan bahwa tidak adanya risiko yang berarti bahkan walaupun ada risikonya relatif kecil. Seperti yang dinyatakan oleh 003, *“risikonya paling lebih ke diri*

pribadi mungkin, karena jika melihat dari sisi konsumen dengan adanya kepraktisan dalam pembayaran itu membuat tingkat konsumerisme yang semakin tinggi, tapi untuk risiko kayak kesalahan data, dan lain-lain itu jarang terjadi”. Kemudian, pernyataan dari 001 “sejauh ini saya tidak merasa tidak ada risiko negative, bahkan dengan menggunakan QRIS ini saya bias terhindar dari risiko pencurian uang”. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengindikasikan bahwa QRIS memiliki tingkat risiko yang rendah (Saputri, 2020).

Dari 10 UMKM yang kami wawancarai mengatakan bahwa terdapat hambatan ataupun kendala dalam menggunakan QRIS diantaranya seperti jaringan internet yang kurang stabil, kuota habis, dan membutuhkan waktu yang lama agar dana atau uang bisa masuk ke rekening bank. Selain itu, ada pula hambatan atau kendala lain seperti sistem QRIS yang *loading* bahkan *error*. Meskipun mereka mengetahui berbagai hambatan terkait penggunaan QRIS, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi intensi mereka dalam menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran secara digital atau *non - tunai*.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa intensi UMKM dalam menggunakan QRIS juga dibentuk oleh pengaruh dari pihak eksternal. Terdapat beragam pengaruh eksternal yang membuat mereka tetap menggunakan QRIS untuk bisnisnya. Ada yang dipengaruhi dari Bank Indonesia langsung, teman dekat, PJSP, saudara dekat, serta UMKM lain.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penerapan sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Dengan adanya QRIS dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan proses transaksinya. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa intensi UMKM menggunakan QRIS dibentuk oleh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan dapat juga dibentuk oleh pengaruh pihak eksternal yaitu dari Bank Indonesia langsung, teman dekat, PJSP, saudara dekat, dan UMKM lainnya. Dari persepsi manfaat, para pelaku UMKM mengindikasikan bahwa QRIS memiliki banyak manfaat. Dari persepsi kemudahan, pelaku UMKM merasa bahwa penggunaan QRIS lebih praktis. Dari persepsi risiko, para pelaku UMKM mengungkapkan bahwa kendala yang terdapat pada QRIS tidak terlalu signifikan dan risikonya pun relatif kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat persepsi positif dari pelaku UMKM terhadap QRIS yang dapat membentuk intensi kuat bagi pelaku UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran mereka dengan menggunakan QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. *Psychological Bulletin*, 82(2), 261.
- Asrori, M. (2007). Psikologi Pembelajaran. In *CV Wacana Prima*. CV Wacana Prima.
- Featherman, M. S., & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(4), 451–474.

- Hutagalung, R. A., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2021). Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum Dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 94–103.
- Indriyani, D., & Sartika, S. H. (2022). Persepsi Generasi Z pada Penggunaan E-wallet selama Pandemi Covid-19. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 6(1), 68–74.
- Kristanti, E., & Marta, R. F. (2021). Persuasive and Educative Advertising Content of Quick Response Code Indonesian Standard in Pandemic Era. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 301–308.
- Kurniasih, A., Lestari, S. D., & Herminingsih, A. (2013). Persepsi mahasiswa terhadap kuliah kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap sikap dan intensi berwirausaha mahasiswa. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 2(2), 129–146.
- Musthofa, M. A., Kurniati, R. R., & Hardati, R. N. (2020). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Uang Digital (Studi Pada Pengguna Ovo Di Kota Malang). *JLIGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 9(2), 175–184.
- Ningsih, H. A., M Sasmita, E., & Sari, B. (2021). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(1), 1–9.
- Paramitha, D. A., & Kusumaningtyas, D. (2020). *QRIS*. Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Pracoyo, A., Paulina, P., Wijaya, E., Bagasworo, W., & Rofianto, W. (2022). Sosialisasi QRIS Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas UMKM Provinsi DKI Jakarta. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 11–20.
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23–36.
- Rayadi, R., & Maradesa, D. (2021). Evaluasi Sistem Pembayaran Non Tunai Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3).
- Saputri, O. B. (2020). Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital. *KINERJA*, 17(2), 237–247.
- Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS Di Mata UMKM: Eksplorasi Persepsi Dan Intensi UMKM Menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921–946.
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287–297.
- Silalahi, P. R., Tambunan, K., & Batubara, T. R. (2022). Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 122–128.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Sugianti, N., & Anwar, K. U. S. (2021). Pengaruh Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Wirausaha Kecil Di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(4), 321–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i4.57>

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Bandung: Alfabeta.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75.